

ANALISIS KEMANDIRIAN DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Oleh :

Zubaidah Rahman

Prodi Akuntansi - Universitas Gorontalo

Email : zubaidahrahman78@gmail.com

Pratiwi Laere

Prodi Akuntansi - Universitas Gorontalo

Email: pratiwilaere18@gmail.com

Article Info	Abstract
<i>Article History :</i> <i>Received 01 Nov - 2021</i> <i>Accepted 29 Nov - 2021</i> <i>Available Online 29 Nov - 2021</i>	<i>This study aims to determine the Independence and Financial Capability of Regional Autonomy in Bone Bolango Regency. The object of research at the BKPD Office, Bone Bolango Regency. The ratio analysis method used is the Regional Financial Independence Ratio and Regional Financial Capability Ratio. The results of the analysis that have been carried out are that (2) the financial independence of Bone Bolango Regency based on the ratio of regional financial independence is very low to regional autonomy, (2) the financial capacity of Bone Bolango Regency based on the ratio of regional financial capacity is very low or regional autonomy.</i>
Keyword : <i>Regional Autonomy,</i> <i>Regional Finance, Kab.</i> <i>Bone Bolango</i>	

1. PENDAHULUAN

Pengaplikasian autonomy di wilayah indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi tujuan administratif, tujuan ekonomi dan tujuan politik. Sejak ditetapkan peraturan perda, ada hal positive yang diinginkan dalam peraturan tersebut, autonomy wilayah sampai saat ini mengalami hal positive contoh dalam berkewajiban mengatur daerahnya sendiri. Pemberian kekuasaan ini sebagai acuan untuk pola government yang pemfokus. Maksud dari pemberian otonomi tersebut kepada daerah memberikan hal positif yang baik contohnya untuk meningkatkan wilayahnya, termasuk rakyatnya serta peran masyarakat ikut serta dalam meningkatkan proses pemerintahan dan infrastruktur (Desita,2015).

Menurut peraturan dalam (Adhim ,2011) mengenai Pemerintah Daerah dan mengenai perbandingan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai poin dimana awal mulainya autonomy wilayah (adalah) adalah hak wilayah autonomy mengurus dengan mengatur kebutuhan rakyat berdasarkan inisiatif dan kreatif rakyat berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan. Sedangkan perbandingan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu pemerataan antar daerah harus secara memadai, demokratis, jujur, dan jelas dengan melihat kemampuan, situasi, dan kepentingan daerah searah dengan pertanggung jawaban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk dalam penyelenggaraan dan penjagaan keuangannya.

Menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 dalam (Muzdalifa,2013) mengenai perbandingan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada point c dijelaskan bahwa Undang-Undang ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dalam penyediaan sumber-sumber dana yang berlandaskan kekuasaan dari Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan pemberian Tugas Pembantu, perlu lagi diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berupa sistem keuangan yang sudah diatur berlandaskan pembagian kekuasaan, kewajiban, dan pertanggung jawaban yang jelas antar susunan pemerintahan.

Menurut Adhim (2011) Hubungan pada hakikat otonomi daerah adalah penyerahan kekuasaan atas kebijakan yang sudah diputuskan, pengelolaan anggaran publik dan peraturan kegiatan government kepada hingga posisi pengelolaan regional finance banyak diinginkan karena untuk memberikan statistik perubahan dana dan terealisasi, baik dalam pemasukan ataupun pembayaran dan analisa terhadapnya adalah penjelasan yang sangat penting karena dapat membentuk strategi pada pengelolaan regional finance.

Hadi dalam Iman Firmansya (2017) mengatakan Kemandirian keuangan daerah yaitu melihat besar kecilnya tingkat kemandirian disuatu daerah untuk membiayai semua keperluan atau kebutuhan. Tolak ukur untuk melihat kemampuan daerah dalam mengurus daerahnya adalah keahlian yang mandiri bagian keuangan, di samping itu ada keadaan yang beda contohnya kondisi demografi, potensi wilayah, kemampuan sumber daya alam, beserta rakyat kepada daerah. regional finance merupakan ciri penting untuk mengetahui secara real keahlian daerah dalam mengatur daerahnya sendiri. Dengan kata lain, keuangan sangat penting karena dapat mengatur tingkat keahlian daerahnya dalam mendukung otonomi daerah Saprudin (2018).

Selanjutnya Menurut Savitry (2011) tolak ukur kemampuan keuangan daerah yang biasa digunakan pada peneliti-

peneliti sebelumnya yaitu dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dengan melihat besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah akan memperlihatkan besar kecilnya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Ada hal yang perlu dikutip yaitu kenaikan Pendapatan Asli Daerah bukan harus membuat pajak baru tetapi melihat daerahnya memiliki kreatifan ataupun keahlian dalam meningkatkan sumber potensi yang ada pada daerah tersebut. Begitupun, ketidak mampuan pemda dalam menggali sumber penerimaan potensi yang dimiliki dapat menimbulkan rendahnya keahlian keuangan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah akan terhambat.

Untuk mengukur tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan dalam mendukung otonomi daerah, penelitian ini menggunakan rasio kemandirian, dan rasio kemampuan keuangan. Menurut Mahmudi (2006) Dalam buku analisis laporan keuangan pemerintah daerah mengatakan rasio kemandirian adalah perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan. Artinya ketergantungan wilayah (daerah) kepada anggaran (Provinsi dan pemerintah pusat) , sedangkan ratio kemampuan keuangan mengetahui sejauh mana peranan pendapatan asli daerah (PAD) dalam hal membiayai.

Kabupaten Bone Bolango berdiri pada tanggal 25 Februari 2003 dan merupakan pemekaran Kabupaten Gorontalo dan memiliki 18 kecamatan. Kabupaten Bone Bolango sebagai salah satu daerah otonom yang berupaya secara berkesinambungan untuk terus meningkatkan kemandirian dan kemampuan keuangan daerah baik dalam hal pengelolaan maupun peningkatan kapasitas fiskal daerah. Sebab dengan adanya otonomi daerah ini, maka pemda (pemerintah daerah) harus dapat meningkatkan kemandirian dan kemampuan keuangan.

InfoPublik (2018) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Bolango masih tergolong dibawah angka ideal. Hal ini menjadi perhatian khusus Bupati Bonebol Hamim Pou. Hamim Pou,

mengatakan, peranan pendapatan asli daerah (PAD) harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian kabupaten tersebut. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Bone Bolango lebih kreatif lagi dalam mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada khususnya menyadarkan kepada masyarakat pentingnya membayar

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Analisis

Data kualitatif, yaitu data (tidak dinyatakan dengan angka) yang merupakan data yang tersaji dalam bentuk informasi deskriptif yang dinilai mampu memperkuat basis data demi keabsahan peneliti ini. Metode kuantitatif yaitu data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

KKD dilihat kecil besarnya PAD daripada penerimaan transfer pemerintah pusat.

Tabel 1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

RK(%)	Kriteria
75% - 100%	Tinggi
50% - 75%	Sedang
25% - 50%	Rendah
0% - 25%	Sangat Rendah

Menurut Halim (2007) rumus :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100 \%$$

Sumber : Suprpto dalam Dewi (2015)

Menurut Ratna (2011) Ketergantungan wilayah (daerah) dari anggaran luar. Semakin besar kemandirian berarti semakin rendah ketergantungan dari pemerintah pusat dan begitupun sebaliknya. Kemandirian di daerah melihat keadaan peran masyarakat dalam

pajak atau penggalian sumber daya alam baru. sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber lapatan Asli Daerah agar mampu memiliki tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan dalam mendukung otonomi daerah dalam membelanjai daerah sendiri.

membangun daerah seperti membayar pajak dan membayar retribusi daerah sehingga masyarakat meningkat kesejahteraanya.

2. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan pemda (pemerintah daerah) dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk membelanjai pengeluaran kegiatan pembangunan daerah. Untuk menghitung rasio kemampuan keuangan dengan membandingkan penerimaan PAD (pendapatan asli daerah) terhadap TPD (Total Pendapatan Daerah) penjelasan tersebut merupakan RKKD Rasio Kemampuan Keuangan Daerah rumus dibawa ini (Ratna:2011):

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PADt}}{\text{TPDt}} \times 100 \%$$

Ket:

Total Pendapatan Asli Daerah Tahun t : PADt

Total Pendapatan Daerah Tahun t : TPDt

Tabel 2 Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Presentase	Kemampuan Keuangan
>50,00%	Sangat Baik
40,01 – 50,00%	Baik
30,01 – 40,00%	lang
20,01 – 30,00%	Cukup
10,01 – 20,00%	Kurang
0,00 – 10,00%	Sangat Kurang

Source : (Ratna,2011)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kabupaten Bone Bolango menjadi daerah setahun setelah berlakunya otonomi di Provinsi Gorontalo dengan ditetapkannya UU

No 6. Kabupaten Bone Bolango ada 18 Kec dan 165 desa/kelurahan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bone Bolango memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Bolaang Mongondow (Provinsi Sulawesi Utara) dan Kabupaten Gorontalo Utara;

Selatan –Teluk Tomini; Barat – Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo; Timur – Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Provinsi Sulawesi Utara)

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah (perda) Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang baru Kab Bonbol (Bone Bolango) No 08 2016 (BKPD) Kabupaten Bone Bolango dimana sebelumnya Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota,

Sesuai keputusan Kabupaten Bone Bolango Nomor 08 Tahun 2016 dengan badan keuangan pendapatan daerah Kabupaten Bonbol mempunyai tugas membantu Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango utamanya dalam bidang mengelola financial yang mempunyai manfaat merumusan kebebasan metode penerimaan, dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang dibantu oleh UPTD dalam lingkup kerjanya. Adapun kewenangannya yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah, menyusun laporan keuangan daerah serta menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan aset daerah.

Visi dan Misi tempat peneliti

Ringkasan umum tentang kondisi yang disukai pada akhir persiapan. Berhubungan oleh asas sebagai referensi susunan catatan persiapan pembentukan dan berpatokan kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan melihat keadaan masalah pada daerah adalah tujuan dari misi. Merujuk kondisi aktual capaian pembentukan periode sebelumnya 2010-2015, harus melawan masa yang mendatang disertai masalah-masalah kekinian, maka diadakan tolak ukur tujuan misi dan visi yang telah disampaikan oleh Hamim Pou, maka RPJPD sebagai berikut:

“Terwujudnya Bonbol Cemerlang 2021”

Memaknai visi dalam bentuk implementasi misi, tujuan dan sasaran, maka pengertian visi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut:

CEMERLANG dalam makna luas adalah suatu kondisi pelaksanaan pembangunan kabupaten Bone Bolango yang unggul dan terdepan berdaya saing serta masyarakatnya berada pada tingkat peradaban yang tinggi.

CEMERLANG dalam makna akronim memiliki arti sebagai berikut:

CE (Cerdas), MER (Modern), LANG (Gemilang)

Cerdas : Adalah kondisi masyarakat yang menjalani kehidupan sebagai warga negara berlandaskan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani serta memiliki kecerdasan akal budi intelektual, akal budi emosional, dan akal budi spiritual.

Modern : Adalah kondisi entitas masyarakat Bone Bolango yang memiliki kemajuan peradaban manusia dengan bercirikan kemampuan adaptasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

Gemilang : Memiliki makna capaian suatu kinerja pelayanan pemerintahan yang diindikasikan dengan suatu kondisi masyarakat sejahtera dari sisi ekonomi dalam konteks kesejahteraan social, dan sejahtera dari makna kebijakan berarti penekanan terhadap jangkauan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Ringkasan misi tentang cara yang akan dilakukan agar mencapainya vision disertai tujuan yang akan tercapainya vision tersebut. mision pembentukan dibawah ini:

Misi kesatu: Mewujudkan masyarakat Sehat, Cerdas dan sejahtera.

Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam peningkatan pelayanan berkualitas melalui pembangunan sarana masyarakat yang sejahtera, cerdas dan sehat, maka terwujudnya sumberdaya manusia berkarakter dengan mandiri.

Misi Kedua: Menciptakan kecepatan pembentukan prasana dan daerah menjadi penunjang kemajuan daerah mendasar alam semesta

Merupakan upaya keberlanjutan (percepatan) tahapan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dari periode sebelumnya (2010-2015) menuju periode akan datang (2016-2021) dalam segmentasi koneksitas antara pembentukan prasana dengan pembangunan daerah smenjadi pilar utama penunjang kemajuan daerah berazaskan kelestarian alam semesta.

Misi Ketiga: Mewujudkan perekonomian Daerah yang berdaya saing, merata dan berkeadilan

Merupakan upaya pemerintah kabupaten Bone Bolango dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui optimalisasi dan distribusi

manfaat sumberdaya alam guna tercapainya pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Misi Keempat: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang moderen dan berbudaya

Adalah upaya pemerintah kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tatakelola pemerintahan yang berpedoman pada prinsip-prinsip Good and clean Governance dengan penonjolan kemampuan adaptif terhadap perubahan namun tetap berpegang teguh pada modernitas bercirikan nilai-nilai budaya

Dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Daerah

Table 3 Total Realisasi PAD Pemerintah Kab BonBol Periode 2016-2018

Tahun	Pendapatan Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg dipisahkan (Rp)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Rp)	Total Realisasi PAD (Rp)
2016	Rp.6,943,332,346.00	Rp.1,734,677,570.25	Rp.515,533,098.00	Rp.52,885,911,175.16	Rp. 62,079,454,189.41
2017	Rp.9,472,060,893.00	Rp.1,275,340,230.00	Rp.793,174,405.00	Rp.74,657,256,646.34	Rp. 86,197,832,174.34
2018	Rp.10,915,823,421.00	Rp.1,438,637,979.50	Rp.1,244,178,967.00	Rp.51,496,572,343.63	Rp. 65,095,212,711.13

Sumber: Data diolah 2020

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, tabel diatas total realisasi PAD diperoleh dari pendapatan pajak daerah + hasil retribusi daerah + hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain pendapatan daerah yang dipisahkan, pada Tahun 2016 total realisasi PAD sebesar Rp. Rp. 62,079,454,189.41 pada tahun 2017 total realisasi PAD mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp. 86,197,832,174.34 hal ini disebabkan pada tahun tersebut kenaikan pada

Total Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali

Tabel 4 Total Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)
2016	Rp. 62,079,454,189.41	Rp. 700,881,386,363.00	Rp. 112,678,182,885.00	Rp. 875,639,023,437.41
2017	Rp. 86,197,832,174.34	Rp. 53,550,935,042.00	Rp. 131,332,988,500.00	Rp. 871,081,755,716.34
2018	Rp. 65,095,212,711.13	Rp. 749,419,031,700.00	Rp. 161,126,362,101.00	Rp. 975,640,606,512.13

Sumber: Data diolah 2020

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tabel 5.2 di atas Total Pendapatan Daerah di peroleh dari Pendapatan Asli Daerah + Dana Perimbangan + Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Total pendapatan daerah tahun 2016

dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang di beri tanggungjawab oleh Kepala Daerah untuk mengerjakan satu program strategis yaitu Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan.

Pendapatan Asli Daerah

Semua penerimaan wilayah berasal oleh sumberekonomi daerah tersebut adabeberapa yaitu: lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah, hasil pengelolaan yang dipisahkan, retribusi pajak dan pajak daerah penjelasan tersebut adalah pad (pendapaatan asli daerah) Sumber-sumber realisasi dan anggaran PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kab BonBol disajikan dibawah init:

Pendapatan Pajak Daerah, penerimaan hasil pengelolaaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan kekayaan daerah yang dipisahkan kemudian pada tahun 2018 total realisasi Pendapatan Asli Daerah kembali menurun sebesar Rp. 65,095,212,711.13 ini disebabkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah menurun Total realisasi PAD Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi.

oleh daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah diperoleh dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut tabel total pendapatan daerah kabupaten Bone Bolango tahun 2016 sampai dengan 2018:

sebesar Rp. 875,639,023,437.41. pada tahun 2017 total pendapatan daerah menurun menjadi Rp. 871,081,755,716.34 penurunan ini disebabkan oleh Dana Perimbangan turun dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2018

menjadi Rp. 975,640,606,512.13 kenaikan tersebut disebabkan naiknya dana perimbangan.

Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang angka aset bersih dalam satu tahun yang berkaitan dan belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rek kas umu daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar.

Table 5 Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2018

Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Transfer (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)
2016	Rp.537,770,253,297.00	Rp.159,410,900,481.00	Rp.307,862,554.00	Rp.147,208,806,201.00	Rp. 844,697,822,533.00
2017	Rp.546,271,953,358.60	Rp.173,218,547,455.00	Rp.366,540,000.00	Rp.173,844,096,764.00	Rp. 893,701,137,577.60
2018	Rp.585,980,498,131.80	Rp.196,018,579,935.00	Rp.251,751,814.00	Rp.176,236,948,386.00	Rp. 958,487,778,266.80

Sumber: Data diolah 2020

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, tabel 5.3 di atas Total realisasi belanja daerah diperoleh dari belanja tidak langsung + belanja langsung + belanja tak terduga + transfer. Dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pada tahun 2016 Total Realisasi belanja daerah sebesar Rp. 844,697,822,533.00, selanjutnya periode 2017 sebesar Rp. 893,701,137,577.60 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 958,487,778,266.80. Realisasi belanja daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan.

Analisis Data

Menurut Siregar Baldrice (2017) Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya otonomi daerah maka urusan yang menjadi hak dan tanggungjawab daerah meningkat, untuk itu diperlakukan sumber daya, termasuk sumber daya keuangan.

Menurut Djaini (2016) Analisis rasio keuangan adalah suatu proses yang mengidentifikasi ciri-ciri yang penting tentang keadaan keuangan dan kegiatan perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

Pada penelitian ini untuk menganalisis kemandirian dan kemampuan keuangan terhadap otonomi daerah peneliti memakai 2 ratio pengukuran finance daerah adalah ratio kemandirian dengan ratio kemampuan keuangan daerah. adapun data yang diperoleh pada penelitian ini adalah mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Data yang diambil adalah data dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2016

sampai dengan Tahun 2018. Berikut disajikan analisis kemandirian dan ratio kemampuan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Rahman (2014) dalam penjelasannya Ratio kemandirian mencerminkan wilayah masih bergantung pada anggaran dari provinsi maupun pemerintah pusat, Sehingga besarnya bilangan ratio tersebut menunjukkan pmdah dalam kemandirian keuangan daerahnya.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Provinsi} + \text{Transfer Pusat}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Tahun 2016 =

$$\frac{62,079,454,189.41}{700,881,386,363.00} \times 100\%$$

= 8,86%

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PAD Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 sebesar Rp. 62,079,454,189.41 dibandingkan dengan Total Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman sebesar Rp. 700,881,386,363.00 dan dikalikan 100% (persen) dengan demikian rasio kemandirian tahun anggaran 2016 mencapai presentase 8,86%. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah kabupaten bone bolango tergolong dalam kriteria sangat rendah. Yang mana bantuan provinsi dengan pemerintah pusat lebih dominan dri PAD tersebut.

Rasio Kemandirian Tahun 2017 =

$$\frac{86,197,832,174.34}{653,550,935,042.00} \times 100\%$$

= 13.19%

Pada tahun 2017 rasio kemandirian meningkat menjadi 13.19%. Berlandaskan hasilnya yang dilihat pada Laporan Realization Anggaran PAD tahun 2017 sebesar Rp.86,197,832,174.34. dibagi dengan jumlah pendapatan ekstern. Yaitu Total Transfer Pusat

+ Provinsi + Pinjaman Rp. 653,550,935,042.00 dikalikan 100% (persen), peningkatan ratio dikarenakan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Bone Bolango yang meningkat menjadi Rp. 86,197,832,174.34 dan meningkatnya pada lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah sebesar Rp. 74,657,256,646.34 akan tetapi peningkatan tersebut termasuk dalam kriteria sangat rendah karena bantuan oleh pemerintah provinsi ataupun pusat lebih besar daripada pad yang dimiliki Pemerintah wilayah KabBone Bolango.

$$\text{Rasio Kemandirian Tahun 2018} = \frac{\text{Rp. 65,095,212,711.13}}{\text{Rp. 749,419,031,700.00}} \times 100\% = 8,69\%$$

Pada tahun 2017 rasio kemandirian menurun menjadi 8,69% Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 65,095,212,711.13 dibagi dengan jumlah pendapatan ekstern. Yaitu Total Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman Rp. 749,419,031,700.00 dikalikan 100% (persen), penyusutan ratio dikarenakan pada PAD Pemerintah Bone Bolango menyusut yaitu Rp. 65,095,212,711.13 dan mengalami penurunan juga Rp. 51,496,572,343.63 di lain-lain PAD yang sah. Hal ini tetap menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah kabupaten bone bolango tergolong dalam kriteria sangat rendah. Yang mana bantuan oleh provinsi dengan pemerintah pusat lebih dominan dari PAD tersebut.

RKKD (Rasio Kemampuan Keuangan Daerah)

Keahlian pemda untuk menambah PAD untuk membelanjai pengeluaran kegiatan infrastruktur daerah. Untuk menghitung ratio kemampuan keuangan dengan membandingkan penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap TPD (total Pendapatan Daerah) penjelasan tersebut merupakan RKKD Rasio Kemampuan Keuangan Daerah rumus dibawah ini (Ratna:2011) :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PADt}}{\text{Total Pendapatan Daeraht}} \times 100 \%$$

Ket:

Total Pendapatan Asli Daerah Tahun t : PADt

TPDt: Total Pendapatan Daerah Tahun t : TPDt

$$1. \quad \text{RKKD Tahun 2016} = \frac{62,079,454,189.41}{875,639,023,437.41} \times 100\%$$

(Ratio Kemampuan Keuangan Daerah)

Rasio Kemampuan keuangan daerah tahun 2016 sebesar 7,09% Berdasarkan hasil perhitungan yang dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 62,079,454,189.41 dibagi dengan Total Pendapatan Daerah Rp. 875,639,023,437.41 dikalikan 100% (persen) keahilan pemda Kabupaten Bolango untuk membelanjai aktivitas pemerintah, pelayanan dan infrastruktur periode 2016 masih sangat kurang penyebabnya karena PAD hanya sebesar Rp. 62,079,454,189.41. Hal ini menunjukkan bahwa Kemampuan pemerintah daerah kabupaten bone bolango tergolong dalam kriteria Sangat Kurang.

$$2 \text{ Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017} = \frac{86,197,832,174.34}{871,081,755,716.34} \times 100\%$$

$$= 9,90\%$$

Pada tahun 2017 rasio kemampuan meningkat menjadi 9,90%. Berdasarkan Laporan Realization Anggaran, PAD tahun 2017 sebesar Rp. 86,197,832,174.34. dibagi dengan Total Pendapatan Daerah Rp. 871,081,755,716.34 dikalikan 100% (persen), peningkatan ratio dikarenakan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Bone Bolango yang meningkat menjadi Rp. 86,197,832,174.34 dan meningkatnya pada lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah sebesar Rp. 74,657,256,646.34 akan tetapi peningkatan tersebut termasuk dalam kriteria Sangat Kurang dalam untuk membelanjai daerah sendiri.

$$3. \text{ Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2018} = \frac{65,095,212,711.13}{975,640,606,512.13} \times 100\%$$

$$= 6.67\%$$

Pada tahun 2018 rasio kemampuan menurun menjadi 6.67%. Berdasarkan Laporan Realization Anggaran, PAD tahun 2018 sebesar Rp. 65,095,212,711.13. dibagi dengan Total Pendapatan Daerah Rp. 975,640,606,512.13 dikalikan 100% (persen), penyusutan ratio dikarenakan dari PAD Pemerintah Bone Bolango menyusut yaitu Rp. 65,095,212,711.13 dan mengalami

penurunan juga Rp.51,496,572,343.63 di lainlain PAD yang sah. Hal ini tetap menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah kabupaten bone bolango masih tergolong dalam kriteria sangat kurang dalam membelanjai daerah sendiri.

Tabel 6 Kriteria Hasil Perhitungan Analisis Rasio Kemandirian

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Dari Pemerintah Pusat (Rp)	Tingkat Kemandirian (%)	Kriteria
2016	Rp. 62,079,454,189.41	Rp. 700,881,386,363.00	8.86%	Sangat Rendah
2017	Rp. 86,197,832,174.34	Rp. 653,550,935,042.00	13.19 %	Sangat Rendah
2018	Rp. 65,095,212,711.13	Rp. 749,419,031,700.00	8.69%	Sangat Rendah
RATA – RATA			10 .24%	Sangat Rendah

Sumber: Data diolah tahun 2020

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tabel 5.4 diatas, dalam periode 2016-2018 tergolong Kurang stabil karena mengalami fluktuasi terhadap hasil perhitungannya.

Pada tahun 2016 presentase Rasio Kemandirian hanya mencapai 8.86% artinya KKD masih sangat rendah di Kab Bone Bolango, maka disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah tersebut masih sangat rendah dan ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat masih besar, terutama berupa DAU/DAK yang masih cukup besar. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga belum bisa mengoptimalkan pontesi PAD (Pendapatan Asli Daerah), hal dapat dilihat pada Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran dari penerimaan periode 2016 retribusi dan pajak wilayah tidak mencapai target dan Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih terbilang kecil. (GorontaloAntara,2016) Bupati Bone Bolango Hamim Pou mengatakan kepada seluruh Kepala Desa (Kades) agar proaktif dan mengoptimalkan pungutan pajak daerah di desa masing-masing."Saya minta keseriusan kades untuk mengoptimalkan pungutan pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, perlu keseriusan kepala desa untuk memaksimalkan dan mengintensifkan serta menggali potensi-potensi pendapatan daerah. (GorontaloAntara,2016) - Kepala Dinas KP Kelautan dan perikanan Bone Bolango, Syaiful Uma mengungkapkan, sumber dana terbesar didapat dari aktivitas pelelangan ikan."Tetapi angka itu sebenarnya terbilang kecil.

Pembahasan

Kemandirian Keuangan Daerah dalam Mendukung Otonomi Daerah

Menurut Rahman (2014) dalam penjelasannya Ratio kemandirian mencerminkan wilayah masih bergantung pada anggaran dari provinsi maupun pemerintah pusat, Sehingga besarnya bilangan ratio tersebut menunjukkan besar pmdah dalam kemandirian keuangan daerahnya.

Penyebabnya hanya satu, yakni kepatuhan dari masyarakat pengguna pelelangan ikan. Karena sebagian besar tidak membayar retribusi," katanya. Rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah Hal tersebut dapat dilihat pada Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hanya sebesar Rp. 62,079,454,189.4. dibandingkan dengan Total Dana Ekstern yaitu Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman sebesar Rp. 700,881,386,363.00.

Kemudian pada tahun 2017 Rasio Kemandirian mengalami peningkatan walaupun hanya seberapa yaitu presentase mencapai 13.19%, dimana peningkatan tersebut terjadi karena bantuan dari pemerintah pusat berkurang dibandingkan tahun sebelumnya dan juga diikuti oleh penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran yang meningkat Lain-lain PAD yang Sah dan penerimaan pajak peningkatan tersebut karena adanya Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) yang masuk yaitu sebesar Rp 21.612.064.834,60. Akan tetapi, peningkatan tersebut masih tergolong dalam kriteria sangat rendah. Pendapatan Asli Daerah yang rendah pada tahun 2017 ini juga disampaikan bahwa jika ingin PAD besar, maka tugas pemerintah harus memperbanyak pendapatan masyarakat. contohnya dengan memperbaiki, membangun, dan meningkatkan layanan publik, Pendapatan Asli Daerah BonBol dari tahun ke tahun naik tapi masih rendah. (InfoPublik,2017) Dilihat dari Total Realisasi PAD tahun 2017 naik yaitu Rp.

86,197,832,174.34 dibandingkan dengan Total Dana Ekstern yaitu Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman sebesar Rp. 653,550,935,042.00. Jadi pemerintah daerah masih bergantung pada dana dari Provinsi maupun pusat masih tinggi contohnya DAU dan DAK.

Dan Rasio Kemandirian pada tahun 2018 mendapati kembali penurunan persentase yaitu 8,69%, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, PAD (pendapatan asli daerah) menurun Rp. 65,095,212,711.13 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan penurunan pada lain-lain PAD yang sah, Hal ini disampaikan Bapak Kabid Pendapatan Adisaputera Abd, Karim, S. Kom dan Bapak Kabid Akuntansi BKPD Bone Bolango Febian Djunaid, S. Kom “dimana peningkatan Pendapatan Asli Daerah tahun yang 2017 naik karena adanya Dana Bos yang masuk dan tahun 2018 sudah bukan lagi rekening Pendapatan Asli Daerah sudah dimasukkan pada Pendapatan Hibah atau Lain-lain Pendapatan Yang Sah Sehingga mengalami penurunan yang cukup besar”. dan Dana Ekstern yaitu Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman juga meningkat sebesar Rp. 749,419,031,700.00. Sehingga Bantuan dari Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Dalam membiayai Belanja Daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah.

Dari hasil analisis, dapat dilihat bahwa perbandingan antara peneliti sebelumnya “syukirah Dewi (2015)” Ratio yang digunakan ratio Kemandirian dan memiliki kriteria sangat rendah. Menurut Syukirah Dewi akibat pada penelitiannya memiliki kesamaan dengan peneliti ini masih bergantung pada dana pemerintah pusat diingikan pada kedua daerah lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka bantuan dari pemerintah pusat berkurang.

Berdasarkan hipotesis yang diajukan maka penulis menyimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah secara umum dikatakan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat besar dibanding dengan Pendapatan Asli daerah, maka hipotesis ditolak.

Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Otonomi Daerah

Kemampuan pemda (pemerintah daerah) dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk membelanjai pengeluaran kegiatan infakstruktur daerah. untuk menghitung ratio kemampuan keuangan membandingkan penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) penjelasan tersebut merupakan RKKD ratio Kemampuan Keuangan Daerah (Ratna:2011)

Tabel 6 Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2016-2018

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (RP)	TOTAL PENDAPATAN DAERAH (RP)	PAD/TPD (%)	KRITERIA
2016	Rp. 62,079,454,189.41	Rp. 875,639,023,437.41	7,09 %	Sangat Kurang
2017	Rp. 86,197,832,174.34	Rp. 871,081,755,716.34	9,90%	Sangat Kurang
2018	Rp. 65,095,212,711.13	Rp. 975,640,606,512.13	6,67%	Sangat Kurang
Rata-rata			7.89%	Sangat Kurang

Source: Data diolah 2020

Dari table 5.5 hasil kriteria maka berdasarkan laporan realisasi anggaran periode 2016-2018 termasuk fluktuasi perhitungan presentasenya.

Pada tahun 2016 presentase Rasio Kemampuan hanya mencapai 7.09% hal ini sebakban karena PAD di masih kecil untuk membelnajai pengeluaran wilayah (daerah) dengan maish berharap pada pemerintah pusat, berupa DAU/DAK yang masih cukup besar. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga belum bisa mengoptimalkan sumber-sumber PAD, pada Laporan Realisasi Anggaran dari penerimaan periode 2016 retribusi dan pajak daera tidak mencapai sasaran. (GorontaloAntara,2016) Bupati Bone Bolango

Hamim Pou juga mengharapkan kepada seluruh Kepala Desa (Kades) agar proaktif dan mengoptimalkan pungutan pajak daerah di desa masing-masing. "Saya minta keseriusan kades untuk mengoptimalkan pungutan pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, perlu keseriusan kepala desa untuk memaksimalkan dan mengintensifkan serta menggali potensi-potensi pendapatan daerah. (GorontaloAntara, 2016) - Kepala Dinas KP Kelautan dan Perikanan Bone Bolango, Syaiful Umar mengungkapkan, sumber dana terbesar didapat dari aktivitas pelelangan ikan. "Tetapi angka itu sebenarnya terbilang kecil. Penyebabnya hanya satu, yakni kepatuhan dari masyarakat

pengguna pelelangan ikan. Karena sebagian besar tidak membayar retribusi," katanya. Masih rendahnya realisasi PAD, maka lihat pada Laporan Keuangan Yaitu Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018 hanya sebesar Rp. 62,079,454,189.4.

Kemudian pada tahun Anggaran 2017 Rasio Kemampuan mengalami peningkatan walaupun hanya seberapa yaitu mencapai 9,90%, dilihat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada PAD yaitu sebesar Rp. 86,197,832,174.34 dimana Peningkatan tersebut meningkat lain-lain pad yang sah dan penerimaan pajak daerah peningkatan tersebut karena adanya Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) yang masuk yaitu sebesar Rp 21.612.064.834,60. Akan tetapi, peningkatan tersebut masih tergolong dalam kriteria Sangat Kurang. PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang rendah pada periode 2017 ini juga disampaikan bahwa jika PAD ingin besar, maka tugas pemerintah harus memperbanyak pendapatan masyarakat, contohnya dengan memperbaiki, membangun dan meningkatkan layanan publik, pendapatan asli daerah bonbol dari tahun ke tahun naik tapi masih rendah (InfoPublik, 2017)

Pada periode 2018 Rasio Kemampuan mengalami kembali penurunan persentase sebesar 6,67%, penyebabnya berdasarkan Laporan Realization Anggaran PAD (Pendapatan Asli Daerah) menurun yaitu Rp. 65,095,212,711.13 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena penurunan pada tahun 2018 di Lain-lain pendapatan yang sah ini juga disampaikan Bapak Kabid Pendapatan Adisaputera Abd, Karim, S. Kom dan Bapak Kabid Akuntansi BKPD Bone Bolango Febian Djunaid, S. Kom "dimana peningkatan Pendapatan Asli Daerah tahun yang 2017 naik karena adanya Dana Bos yang masuk dan tahun 2018 sudah bukan lagi rekening Pendapatan Asli Daerah sudah dimasukkan di Lain-lain Pendapatan Yang Sah dan Pendapatan hibah Sehingga mengalami penurunan".

Berdasarkan uraian, dilihat perbedaan jika dilihat dari Rasio Kemampuan Keuangan Daerah memiliki kriteria sangat Sangat Kurang dalam penelitian ratna sholikhah (2011) Menurut Ratna Sholikhah penyebabnya sama memiliki kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai infrastruktur wilayah dan masih sangat tergantung kepada anggaran yang berasal oleh Provinsi dan pemerintah pusat,

Kedua pmdah (pemerintah daerah) lebih kreatif lagi dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah maka bantuan dari pemerintah pusat berkuat lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka bantuan dari pemerintah pusat berkurang.

Berdasarkan hipotesis yang diajukan maka penulis menyimpulkan bahwa rasio Kemampuan Keuangan Daerah secara umum dikatakan masih Sangat Kurang sekali. Hal ini disebabkan karena bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat besar dibanding dengan Total Pendapatan daerah, maka hipotesis ditolak.

4. KESIMPULAN

Bersumber dari analisis pmdah Kabupaten Bone Bolango maka kesimpulan yang di ambil adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Rasio Kemandirian Kabupaten Bone Bolango tahun 2016-2018 hanya tahun 2017 yang mengalami peningkatan tetapi peningkatan tersebut masih dalam kriteria penilaian sangat rendah dan untuk tahun sebelum dan tahun sesudahnya tetap masih dalam kriteria penilaian yang sangat rendah atau belum mandiri dalam mendukung otonomi daerah. Hal tersebut PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kab Bonbol masih sangat rendah sehingga masih bergantung dari pusat baik sumber-sumber dana transfer dari pemerintah pusat + provinsi + pinjaman masih besar dengan bantuan terbesar yaitu DAU dan DAK
- Berdasarkan Ratio Kemampuan Keuangan Daerah pemerintah Kabupaten Bone Bolango hanya tahun 2017 yang mengalami peningkatan tetapi peningkatan tersebut masih dalam kriteria penilaian Sangat Kurang dan untuk tahun 2016 dan 2018 tetap masih dalam kriteria penilaian yang Sangat Kurang atau belum mampu Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai pengeluarannya sendiri dan masih tergantung pada pemerintah pusat.

5. REFERENSI

- Abdul Halim, and Muhammad Syam Kusufi. 2016. *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Edited by Ema Sri Suharsi. 2nd ed. Jakarta: Selemba Empat.
- Adhim, Chairul. 2011. "Kemampuan

- Kuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2007-2011).” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2nd ed. Jakarta: Indeks.
- Desita, Putri Nia. 2015. “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pekanbaru (2010 – 2014)” 2. <https://media.neliti.com/media/publications/33890-ID-analisis-kemampuan-keuangan-daerah-dalam-mendukung-pelaksanaan-otonomi-daerah-ko.pdf>.
- Dewi, Syukria. 2015. “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi.” *Fekon* 2 (2): 1–15. <https://media.neliti.com/media/publications/34065-ID-analisis-kinerja-keuangan-daerah-dalam-mendukung-pelaksanaan-otonomi-daerah-peme.pdf>.
- Djaini, Mike Wiyatni. 2016. “Analisis Kemampuan Kinerja Keuangan Pemerintah Otonomi Daerah Pada BPKAD Kabupaten Pohuwato.” Gorontalo: Skripsi Universitas Gorontalo.
- Faud, Ramli. 2015. *Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah*. Makassar: Ghalia Indonesia.
- Gorontalo, Antara. 2016a. “Hamim Harapkan Kades Optimalkan Pungutan Pajak Daerah.” *Antaranews.Com*. 2016. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/29730/hamim-harapkan-kades-optimalkan-pungutan-pajak-daerah>.
- Gorontalo, Antara. 2016b. “PAD Dinas KP Bone Bolango Rp150 Juta.” *AntaraNews.Com*. 2016. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/30276/pad-dinas-kp-bone-bolango-rp150-juta>.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. 3rd ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iman Firmansya. 2017. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi Lampung.” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung* 2015.
- InfoPublik. 2017. “Ingin PAD Naik, Harus Tingkatkan Dulu Pendapatan Rakyat.” *InfoPublik Portal Berita*. 2017. <http://infopublik.id/read/240327/ingin-pad-naik-harus-tingkatkan-dulu-pendapatan-rakyat.html?video=#>.
- InfoPublik. 2018. “Peningkatan PAD Tolok Ukur Kemandirian Daerah.” *InfoPublik Portal Berita*. 2018. <http://infopublik.id/kategori/nusantara/317958/peningkatan-pad-tolok-ukur-kemandirian-daerah?video=#>.
- Lamuda, Ilyas. 2014. “Analisis Pelaksanaan Belanja Dalam Realisasi Anggaran Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Gorontalo Utara.” *Pusat Studi Kajian Ekjonomi & Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo* 2 (02): 149–59.
- Lamuda, Ilyas, and Ng Syamsiah.B. 2018. “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.” *Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo* 2 (1): 27–41.
- Mahmudi. 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Moh, and Dkk. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. 3rd ed. Yogyakarta: BPFE.
- Muzdalifah. 2013. “Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong Dalam Otonomi Daerah.” *Dinamika Ekonomi, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 6 (1): 47–58.
- Nordiawan, and dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahman, Olin. 2014. “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bualemo.” Skripsi Universitas Gorontalo.
- Rahman, Zubaidah. 2018. “Analisis Perlakuan Akuntansi Konstruksi Pengerjaan Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo.” *Gorontalo Accounting* 1: 59–67.
- Ratna, Sholikhah. 2011. “Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000-2009.” *Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Renyowijoyo Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. 3rd ed. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rudiyanto, Muhamad. 2015. “Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan

- Otonomi Daerah.” *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*, 1–115.
- Saprudin. 2018. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo.” *Gorontalo Accounting* 1: 47–58.
- Savitry, Ernhita. 2011. “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 Di Kota Makassar.” *ILmu Pemerintahan* 4: 23–34.
- Siregar Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wurangian, Sanny, and Dkk. 2017. “Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Tomohon (Studi Kasus Di Kota Tomohon Periode Tahun 2007-2015).” *Berkala Ilmiah Efisiensi* 17 (01): 64–78.